

**“PERAN PERUSAHAAN
WAMAR INTERNATIONAL DALAM REKONSTRUKSI IRAQ
PASCA PERANG 2003-2008”**

Adityo Arifianto

20130510198 (Hubungan International)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

adityoarifianto@icloud.com

ABSTRAK

Setelah perang Irak berakhir, Irak mengalami kerugian ekonomi yang sangat signifikan. Untuk dapat melanjutkan status Irak sebagai sebuah Negara yang menjamin kemakmuran rakyatnya, Irak harus dibangun kembali. Namun, Pemerintah Irak tidak dapat melakukan rekonstruksi sendirian. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Irak kembali. Sehingga, Pemerintah Irak membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menanam investasi di rekonstruksi Irak. Amerika Serikat menawarkan beberapa perusahaannya, termasuk Wamar International, untuk bergabung dalam proyek rekonstruksi tersebut. Amanat tersebut merupakan tawaran yang cukup beresiko bagi Wamar International mengingat bahwa kondisi keamanan dalam negeri pasca-perang Irak masih belum stabil. Namun, Wamar International memutuskan untuk menanam investasi dalam jumlah besar dalam rekonstruksi Irak. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mencoba untuk mengkaji alasan mengapa Wamar International memutuskan untuk menanam investasi dalam jumlah besar dalam rekonstruksi Irak, dengan menggunakan teori Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan metode kualitatif.

Kata Kunci: Wamar International, Irak, Amerika Serikat, Rekonstruksi, Investasi.

PENDAHULUAN

Kondisi Iraq sesudah peperangan panjang adalah terjadi kerusakan besar-besaran terhadap bangunan dan penduduknya. Sarana dasar di kota-kota utama Iraq hancur dan peradaban dua sungai kuno juga rusak oleh api perang. Persediaan air minum dan tenaga listrik di Iraq sangat sulit. Polusi lingkungan juga sangat parah. Membubungnya harga barang, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan pengungsi serta masalah ekonomi dan sosial lainnya selalu menghantui rakyat Iraq. Sementara itu, trauma psikologi yang didatangkan perang kepada masa rakyat juga sulit disembuhkan. Perang juga mendatangkan masalah keamanan serius kepada Iraq.

Departemen Perdagangan AS menyatakan pihaknya akan memimpin 15 perusahaan Negeri Paman Sam, termasuk Boeing, General Electric, dan Wamar International, dalam misi kerjasama dan pembangunan kembali mulai Oktober untuk membantu pembangunan kembali Iraq. Misi tersebut membawa pakar bisnis ke negara pada saat kritis. Negara yang hancur memerlukan investasi di segala sektor. AS berupaya menarik sebanyak mungkin investor ke negara tersebut. Bagi mereka yang bersedia mengambil kesempatan itu akan ada potongan dan donasi dalam bentuk pajak serta bantuan untuk sosial.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu: ***“Mengapa perusahaan Wamar International menanam investasi yang besar dalam bidang rekonstruksi Iraq?”***

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana pengumpulan data dan fakta penulis menggunakan analisis muatan dengan penjelasan sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan dari buku, majalah, jurnal, internet, berita online, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang nantinya akan dibahas.

PEMBAHASAN

Pasukan tempur Amerika Serikat (AS) untuk Iraq hari ini (31/8) secara resmi mengakhiri tugasnya selama 7 tahun 5 bulan di Iraq. Mulai dari tanggal 1 September besok tentara AS untuk Iraq tidak akan berperang lagi di wilayah Iraq. Sekitar 50 ribu tentara AS yang masih ditempatkan di Iraq sekarang juga akan ditarik mundur sebelum akhir tahun depan. Opini umum secara merata berpendapat semua tentara AS setelah ditarik mundur akan meninggalkan keadaan yang kacau balau kepada Iraq. Perang yang berlarut selama lebih dari 7 tahun tidak saja tidak mendatangkan demokrasi dan kemakmuran kepada Iraq. Memungkinkan Iraq menghadapi ujian besar di bidang-bidang politik, ekonomi dan keamanan.

Berakhirnya tugas tempur tentara AS untuk Iraq direalisasi berdasarkan Persetujuan Keamanan AS-Iraq. Berdasarkan persetujuan itu, "aksi Iraq bebas" yang dilancarkan tentara AS pada tahun 2003 akan berakhir pada tanggal 31 Agustus hari ini. Mulai dari tanggal 1 September besok, aksi tentara AS di Iraq akan diganti nama baru yaitu "aksi fajar baru" dan sekitar 50 ribu tentara AS di Iraq akan bertanggung-jawab atas pelatihan pasukan keamanan Iraq dan dukungan informasi kepada Iraq. Personel tentara AS itu akan ditarik mundur secara total dari Iraq sebelum akhir tahun depan.

Perang selama lebih dari 7 tahun telah mengakibatkan kerusakan besar-besaran terhadap Iraq. Sarana dasar di kota-kota utama Iraq tidak saja hancur dan peradaban dua sungai kuno juga terusak api perang. Kini, persediaan air minum dan tenaga listrik yang paling pokok di Iraq tetap menghadapi kesulitan dan polusi lingkungan juga sangat parah. Membubungnya harga barang, inflasi, pengangguran, kemiskinan dan pengungsi serta masalah ekonomi dan sosial lainnya selalu menghantui rakyat Iraq. Trauma psikologi yang didatangkan perang kepada massa rakyat juga sulit disembuhkan.

Perang juga meluluhlantakan ekonomi Iraq. Padahal keterbelakangan ekonomi Iraq dewasa ini sangat tidak memadai dengan sumber dayanya yang sangat kaya. Iraq adalah sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya dan cadangan minyak yang telah diketahui tercatat 112,5 miliar barel. Iraq merupakan negara cadangan minyak kedua terbesar di dunia menyusul Saudi Arab. Volume cadangan gas alam Iraq juga tergolong 10 terdepan di dunia. Namun karena dampak perang, volume ekspor minyak Iraq kini hanya 2 juta barel harian yang merupakan seperempat

volume sejenis Saudi Arab. Sekitar seperempat dari total 30 juta populasi Iraq masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Perang juga mendatangkan masalah keamanan serius kepada Iraq. Selama 7 tahun ini peristiwa kekerasan di dalam negeri Iraq tak kunjung padam dan ledakan bom bunuh diri selalu terjadi. Kondisi keamanan di Iraq sejauh ini masih sangat merisaukan. Seiring dengan mendekatnya jadwal penarikan mundur tentara AS, peristiwa kekerasan di berbagai tempat Iraq semakin menjadi-jadi (International.CRI., 2010).

B. Potensi Keuntungan Yang Besar

Wamar International menyetujui dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi dalam jumlah besar dalam proyek rekonstruksi Iraq. Wamar International mempertimbangkan aspek untung rugi dalam Model Aktor Rasional menurut Graham T. Allison, terlihat bahwa Wamar International akan lebih mendapatkan keuntungan daripada kerugian jika Wamar International menyetujui proyek *United States Government's Iraq Infrastructure Reconstruction*. Pertimbangan keuntungan tersebut antara lain adalah pertimbangan rasional Wamar International yang menunjukkan 4 keuntungan yang didapatkan oleh Wamar International, yaitu mendapatkan potongan pajak oleh pemerintah Iraq; izin kepemilikan lahan di Iraq, potensi investasi yang tinggi disertai dengan kemudahan akses perusahaan ke Iraq; serta upaya bantuan keamanan yang terjamin.

C. Potongan Pajak Perusahaan Oleh Pemerintah Iraq

Pemerintah Iraq mengumumkan kepada publik mengenai komitmennya akan investasi asing dan telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan iklim investasi di negaranya. Pemerintah Iraq akhirnya mengesahkan sebuah peraturan yang telah dinanti oleh para investor asing, termasuk Wamar International, Hukum Investasi Nasional (*National Investment Law*) pada tahun 2006 yang menyediakan sebuah landasan legal untuk melindungi investasi asing dan investasi domestik serta kebebasan pajak perusahaan investor. *National Investment Law* secara teori mempersilahkan investor asing dan investor domestik untuk secara adil terqualifikasi untuk mendapatkan lisensi investasi. Dalam prinsipnya, hukum tersebut membebaskan investor dari

pajak dan biaya-biaya lainnya dalam kurun waktu 10 tahun bagi investor yang telah terqualifikasi memiliki izin lisensi investasi di Iraq. (National Investment Law No 13, Chapter Five, Article 15, 2006)

Wamar International melihat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Iraq dalam memberikan kebebasan pajak serta biaya-biaya lainnya guna membangun iklim investasi sebagai salah satu pertimbangan positif yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada Wamar International dalam melakukan investasi di Negara Iraq.

D. Izin Kepemilikan Lahan Di Iraq

Pemerintah Pusat Iraq dan Pemerintah Regional Kurdish (Kurdish Regional Government/KRG) sama-sama memiliki kewenangan dalam mengatur perizinan investasi. Pemerintah Regional Kurdish memiliki aturan tersendiri mengenai investasi yang tertera didalam Kurdish Regional Law nomor 89 tahun 2004. Perbedaan yang paling signifikan diantara *Kurdish Regional Law* dan *National Law* adalah bahwa *Regional Law* memperbolehkan adanya kepemilikan lahan oleh asing. Namun didalam Konstitusi Iraq tertulis bahwa jika terdapat sebuah perbedaan diantara legislasi nasional dengan legislasi regional dalam urusan kepemilikan lahan, maka *Regional Law* lah yang akan diberlakukan.

Hal ini pun mendorong Pemerintah Iraq untuk melakukan perubahan amandemen kedalam *National Investment Law*. Pemerintah Iraq melakukan amandemen *National Investment Law* yang pada akhirnya memperbolehkan pihak asing untuk memiliki kepemilikan lahan terbatas di Iraq untuk kepentingan proyek pembangunan real-estate. Pemerintah Iraq mengizinkan adanya kepemilikan lahan oleh pihak asing dengan harapan bahwa pembangunan real-estate tersebut akan dijual kembali kepada Iraq ketika sudah selesai pada saatnya. Ditambah lagi, amandemen tersebut juga mengatur kepemilikan lahan oleh asing bahwa investor asing diizinkan untuk menyewa lahan selama 50 tahun dan dapat diperpanjang kembali (*renewable*). (National Investment Law No 13, Chapter Three, Article 10, 2006)

Wamar International melihat kebijakan Pemerintah Iraq dalam melakukan amandemen *National Investment Law* dalam memberikan izin kepada investor asing akan kepemilikan lahan sebagai

salah satu pertimbangan positif yang dapat memberikan keuntungan lebih kepada Wamar International dalam melakukan investasi di Negara Iraq.

E. Potensi Investasi Yang Tinggi Disertai Dengan Kemudahan Akses Ke Iraq

Program rekonstruksi yang bernama *US Government's Iraq Infrastructure Reconstruction Program* ini bertujuan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur prominan Iraq, seperti pembangunan infrastruktur bandara, pembangunan infrastruktur jalan raya dan jembatan, pembangunan infrastruktur gedung-gedung dan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur pelabuhan, pembangunan infrastruktur bidang energy, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta pembangunan infrastruktur fasilitas air dan sistem sanitasi Iraq. Sub-sub proyek dari program yang dilaksanakan merupakan bidang keahlian dari perusahaan Wamar International. Ditambah lagi, kondisi domestik Iraq sekarang yang sangat membutuhkan investasi akan mendorong Pemerintah Iraq dalam melakukan upaya-upaya pembangunan dengan maksimal, termasuk dengan menaikkan anggaran belanja Negara.

Sebagai sebuah perusahaan produksi, Wamar International melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis di pasar global yang lebih luas, kesempatan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Iraq, disertai harapan untuk memiliki akses yang lebih mudah dengan pemerintah Iraq.

KESIMPULAN

Sebagaimana sebuah negara yang baru saja pulih dari peperangan, Iraq harus melakukan pembangunan kembali demi melanjutkan statusnya sebagai sebuah negara yang menjamin kehidupan rakyatnya. Dalam rangka rekonstruksi Iraq, Pemerintah Iraq tidak dapat melakukannya sendiri. Kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan proyek rekonstruksi ini sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, Pemerintah Iraq mengumumkan kepada dunia bahwa Iraq membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada para investor asing maupun investor lokal untuk bekerjasama dalam proyek rekonstruksi Iraq.

Sebuah pasal dalam hukum internasional, Konvensi Jenewa IV tahun 1949, mengatur bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang dihancurkan dalam peperangan merupakan tanggung

jawab bagi pemerintahan yang menghancurkannya. Dengan kata lain, Amerika Serikat dan koalisinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam proyek rekonstruksi Iraq. Dalam rangka rekonstruksi Iraq, Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan sebuah proyek yang bernama *United States Government's Iraq Infrastructure Reconstruction Program*, sebuah program yang dikelola oleh USAID (*United States Agency for International Development*), yang bertujuan untuk melakukan rekonstruksi Iraq secara besar-besaran. Program ini menawarkan amanat kepada 15 perusahaan Amerika Serikat untuk menanam investasi dan bekerja sama dalam proyek rekonstruksi Iraq, salah satunya adalah perusahaan Wamar International.

Bagi Wamar International, proyek ini merupakan sebuah tawaran yang memiliki resiko yang cukup tinggi, khususnya dalam aspek keamanan. Sebagai sebuah Negara yang baru saja menjadi sebuah medan perang, tentu saja kondisi keamanan dalam negeri masih tidak stabil. Perpecahan yang terjadi di kelompok-kelompok masyarakat masih kerap terjadi. Terlebih lagi, masa-masa transisi pemerintahan baru sangat rentan sekali terhadap percobaan-percobaan pengambil alihan kekuasaan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi *vacuum of power* yang ada. Jalannya investasi bisa saja anjlok dan hancur sewaktu-waktu akibat stagnansi stabilitas politik dan keamanan Iraq.

Wamar International memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan jika Wamar International menyetujui untuk bergabung dalam proyek ini dan jika Wamar International menolak untuk bergabung dalam proyek ini. Situasi dalam negeri Irak yang sangat haus akan investasi membuat Irak membuka kesempatan yang selebar-lebarnya kepada para investor yang berani mengambil resiko untuk menanam investasi di Irak. Dalam rangka menciptakan atmosfer dan iklim investasi yang baik, pemerintah Irak memberikan perlakuan khusus kepada para investor melalui amandemen-amandemen pada National Investment Law yang mengatur tentang aturan-aturan investasi di Irak. Dalam amandemen tersebut, pemerintah Irak memberikan kebebasan pajak bagi perusahaan selama 10 tahun, serta memberikan izin untuk kepemilikan lahan oleh asing selama 50 tahun (dapat diperpanjang).

Keuntungan-keuntungan tersebut pun ditambah dengan potensi keuntungan yang besar dalam investasi tersebut. Harga lahan di Irak dapat terbilang sangat murah akibat situasi pasca-perang. Potensi keuntungan yang akan didapat oleh Wamar International sangatlah menggiurkan. Salah satunya pertimbangan dan tantangan terbesar Wamar International hanyalah mengenai masalah

keamanan. Namun, dengan kapabilitas Wamar International dalam segi keamanan ditambah dengan komitmen Pemerintah Irak untuk melindungi investornya, resiko tersebut pun dapat diminimalisir.

Wamar International mempertimbangkan adanya *opportunity cost* yang cukup tinggi jika harus menolak tawaran kerjasama tersebut. Dengan menggunakan teori Model Aktor Rasional menurut Graham T. Allison, terlihat bahwa Wamar International akan mendapatkan keuntungan lebih daripada kerugian jika Wamar International menyetujui proyek *US Government Infrastructure Reconstruction Program* ini. Melihat pertimbangan tersebut, Wamar International pun memutuskan untuk bergabung dalam proyek *US Government's Infrastructure Reconstruction Program* dan menanam investasi dalam skala besar di Irak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, E. U. (2010, Juni 12). *TEMPO*. Retrieved from TEMPO.CO:
<http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/06/12/090254715/pemerintah-irak-beri-kemudahan-bagi-investor-asing>
- David, J. (2002). *Capitalism and Freedom*. United State of America: The University of Chicago Press.
- Ibid. (n.d.).
- IndoAlpha. (2014, January 3). *Foreign Direct Investment (FDI)*. Retrieved from INDOALPHA:
<http://www.indoalpha.com/foreign-direct-investment-fdi/>
- International, W. (n.d.). California: dot.jo.
- International.CRI., C. R. (2010). *Situasi Irak Pasca Perang*. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S.
- Melihat Sejarah Perang Iraq 2003. (2014, 06 05).
- National Investment Commisison . (n.d.). *Investor Guide to Iraq*. Republic or Iraq .
- National Investment Commission. (n.d.). *Investment Overview*. Republic of Iraq: National Investment Commission.
- National Investment Law No 13, Chapter Five, Article 15*. (2006). Republic of Iraq.
- National Investment Law No 13, Chapter Three, Article 10*. (2006). Republic of Iraq.
- Sihbudi, R. (2004, Mei 2). Global. *Jurnal Politik Internasional*, 6, hal 43.
- Sumargono. (2010). *Irak Setelah Jatuhnya Rezim Saddam Hussein*. Surakarta.